

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Aparatur Kelurahan Mojolangu Kota Malang

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Kelurahan Mojolangu. Hasil tersebut didapat dari informan aparaturnya Kantor Kelurahan. Berikut adalah hasil yang diperoleh :

1. Pertanyaan : Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar PBB selama ini?

Menurut Bambang Mujiono selaku Lurah Mojolangu, mengatakan bahwa : “Kondisi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak selama ini terbilang cukup sadar.” Hal ini sama seperti yang diucapkan oleh Ibu Sarofah selaku staff kelurahan Mojolangu dan juga Ibu Lurah selaku Ketua Tim Pokmas Sadar Pajak dan Ibu Dewi selaku Staff dari tim Pokmas Sadar Pajak.

2. Apa ada faktor – faktor pendukung lainnya dalam peningkatan penerimaan PBB di wilayah Mojolangu?

Menurut Ibu Lurah selaku Ketua Tim Pokmas Sadar Pajak, mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya peningkatan itu terjadi karena adanya dua hal, yang pertama jumlah penduduknya yang meningkat, dan tarif pajaknya yang naik.” Hal tersebut juga selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Bambang Mujiono , Ibu Sarofah, Ibu Dewi dan Ibu Riyul.

3. Siapa saja yang berkontribusi langsung dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut?

Menurut Pak Bambang Mujiono, selaku Kepala Kelurahan mengatakan bahwa :

“Sudah dua tahun ini ada Pokmas Pajak yang dibentuk lewat PKK Kota sampai ke PKK Kelurahan, mulai dari distribusi SPPT sampai kepada sosialisasi di komunitas PKK . Jadi yang paling berperan adalah ibu – ibu PKK, kemudian yang kedua karena kelembagaan jadinya Pak RT dan Pak RW juga punya peran sosialisasi kepada warganya. Yang terakhir, yang

ketiga informasi – informasi selalu kita support, dari kelurahan lewat media - media yang kita buat di RT dan RW.” Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Sarofah selaku staff kelurahan Mojolangu yang juga mengatakan hal yang sama, termasuk juga oleh Ibu Lurah selaku Ketua Tim Pokmas Sadar Pajak dan Ibu Dewi dan Ibu Riyul selaku Staff dari tim Pokmas Sadar Pajak yang juga mengatakan bahwa yang paling berkontribusi adalah Pokmas Pajak beserta RT dan RW.

4. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB di wilayah Mojolangu?

- Menurut Pak Bambang Mujiono, selaku Kepala Kelurahan mengatakan bahwa :

“Untuk kendalanya yaitu, masih terdapat banyak lokasi atau alamat yang objek pajak yang pemiliknya tidak diketahui oleh warga sekitar dan tidak diketahui kontakannya. Ada juga seperti tanah kosong yang pemiliknya tidak tahu ada dimana, lalu bidang – bidang usaha yang mana pengelolanya sedang tidak ada ditempat, sulit ditemui. Kemudian dari segi administrasi ada beberapa penerbitan SPPT yang tidak tepat, yang mana hal tersebut berkaitan dengan penulisan alamat tercatat yang tidak sesuai dengan alamat semestinya yang ada di lapangan. Jadi, kadang ada yang tertukar gitu pada saat SPPT nya didistribusikan.” Hal ini sama dengan yang diucapkan oleh Ibu Sarofah selaku Staff Kelurahan.

- Sedangkan menurut Ibu Lurah selaku Ketua Pokmas Sadar Pajak :

“Kendalanya itu ya adanya tanah kosong yang pemiliknya ada diluar kota/ di luar wilayah atau bahkan tidak diketahui ada dimana, serta adanya fasilitas umum, bidang usaha atau tempat – tempat keramaian yang pengelolanya tidak ada ditempat. Lalu, pada saat pendistribusian SPPT itu sangat sulit untuk bertemu dengan pemiliknya sedangkan tidak bisa dititipkan ke sembarang orang.” Hal ini selaras dengan yang diucapkan oleh Ibu Dewi dan Ibu Riyul sebagai anggota Pokmas Sadar Pajak

5. Bagaimana *problem solving* atau penyelesaian masalah atas kendala tersebut?
- Menurut Pak Bambang Mujiono, selaku Kepala Kelurahan mengatakan bahwa :
“Untuk penyelesaian masalahnya tidak lain adalah dengan bekerja sama dengan RT RW setempat untuk melacak keberadaan pemilik dari bangunan ini.” Hal ini juga sama seperti yang diucapkan oleh Ibu Sarofah
 - Sedangkan menurut Ibu Lurah, selaku Ketua Pokmas Sadar Pajak Mengatakan bahwa :
“Kalau benar – benar tidak bisa di distribusikan ya kita kembalikan lagi ke Bapenda.”
 - Diimbuhkan oleh Ibu Dewi yang mengatakan bahwa “
“Tapi, tetap kita upayakan dulu mencari identitasnya melalui RT RW setempat, sekiranya masih bisa ditemui, nanti kita titipkan ke RT RW tersebut dengan catatan harus ditanda tangani oleh RT RW setempat.” Hal ini juga sama seperti yang diucapkan Ibu Riyul.
6. Untuk saat ini pembayar PBB terbanyak dari dunia usaha atau pribadi?
Menurut Pak Bambang Mujiono, selaku Kepala Kelurahan mengatakan bahwa :
“Untuk pembayarannya disini imbang ya antara pengusaha maupun pribadi, yak arena itu tadi, adanya sosialisasi yang tidak pilih kasih di bidang usaha maupun di pribadi.” Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Lurah, Ibu Sarofah, Ibu Dewi dan juga Ibu Riyul.
7. Adakah strategi yang digunakan oleh Kelurahan Mojolangu dalam meningkatkan penerimaan PBB di wilayah Mojolangu?
Menurut Pak Bambang Mujiono selaku Lurah Mojolangu, mengatakan bahwa :
“Peningkatan itu ada dua sebab besar, yang pertama adalah jumlah wajib pajaknya bertambah dan yang kedua adalah karena tarif pengenaan PBB nya

juga naik bertambah, kemudian strategi yang digunakan dalam rangka meningkatkan penerimaan lewat PBB di wilayah Mojolangu adalah yang pertama pada saat pelayanan yang menyangkut non kependudukan lalu kita mintakan bukti bahwa yang bersangkutan sudah lunas PBB, kemudian mempersyaratkan juga untuk pengurusan surat – surat yang hubungannya dipakai ke bank atau untuk penanaman modal, jadi strateginya kesana yang berkaitan dengan pelayanan di kelurahan. Kemudian yang strategi kedua adalah bersosialisasi ke warga lewat forum – forum yang ada di kewilayahan atau ke RW setempat. Serta prosentase ketaatan pembayaran yang meningkat karena hasil dari strategi yang dilakukan.” Hal tersebut juga sama seperti pendapat dari Ibu Lurah, Ibu Sarofah, Ibu Riyul dan Ibu Dewi.

8. Apakah masyarakat menerima dengan baik strategi yang digunakan oleh kelurahan Mojolangu tersebut?

Menurut Pak Bambang Mujiono selaku Lurah Mojolangu, mengatakan bahwa :

“Sangat diterima dengan baik, bahkan sosialisasi tersebut sangat ditunggu – tunggu oleh masyarakat.” Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lurah, Ibu Sarofah, Ibu Dewi, dan Ibu Riyul.

9. Apakah strategi tersebut sudah cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB di wilayah Mojolangu?

- Menurut Ibu Lurah selaku Ketua Pokmas Sadar Pajak, mengatakan bahwa: “Cukup efektif ya, karena hal tersebut sangat ditunggu – tunggu oleh masyarakat, dan tahun kemarin Kelurahan Mojolangu mendapatkan *reward* dari Bapenda karena adanya peningkatan penerimaan PBB di wilayah Mojolangu.” Hal tersebut juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah, Ibu Sarofah, Ibu Dewi dan Ibu Riyul.

10. Apakah ada denda terkait keterlambatan dalam pembayara PBB tersebut?

Menurut Ibu Sarofah, mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2018 sampai tahun 2020 masih diberlakukan denda, namun pada tahun 2021 akhir dihanguskan, sehingga tidak diberlakukan lagi denda.” Hal ini disampaikan juga oleh Pak Lurah, Ibu Lurah, Ibu Dewi, dan Ibu Riyul.

Hasil Wawancara dengan masyarakat Mojolangu

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kepada masyarakat Mojolangu yang merupakan wajib pajak dan akan membayar PBB. Peneliti mengambil 10 narasumber untuk diwawancarai. Berikut adalah hasil yang diperoleh :

1. Apakah anda termasuk wajib pajak yang membayar PBB?

Dari ke sepuluh narasumber tersebut mengatakan bahwa semuanya merupakan wajib pajak yang membayar PBB di wilayah Mojolangu dengan beragam objek. Lima diantaranya membayar PBB berupa sawah dan rumah tinggal, tiga diantaranya membayar PBB berupa rumah tinggal saja, dan dua orang membayar PBB rumah tinggal dan bidang usaha.

2. Selama ini apakah anda tertib dalam melakukan pembayaran PBB?

Dari ke sepuluh narasumber tersebut mengatakan bahwa sebagai wajib pajak yang taat, para wajib pajak tersebut membayar pajak dengan tertib. Karena masyarakat menganggap adanya manfaat yang didapat dari membayar pajak, dengan membayar pajak, maka termasuk berkontribusi dalam bidang pembangunan wilayah, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pembangunan ekonomi.

3. Apakah dalam membayar tersebut anda didasari oleh kesadaran karena kewajiban membayar atau karena paksaan?

Dari ke sepuluh narasumber tersebut mengatakan bahwa wajib pajak tersebut membayar pajak atas dasar kesadaran diri sendiri dikarenakan kewajiban membayar pajak serta memahami adanya manfaat dari

membayar pajak tersebut yaitu dengan membayar Pajak maka masyarakat turut serta berkontribusi dalam pembangunan wilayah.

4. Apakah anda pernah terlambat membayar PBB?

Dari ke sepuluh narasumber tersebut mengatakan bahwa pernah mengalami keterlambatan dalam membayar PBB dikarenakan lokasi pembayaran yang jauh.

5. Apakah anda mengalami kendala dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Dari pertanyaan berikut didapatkan berbagai jawaban yang berbeda. Didapati tiga narasumber dengan kendala yang sama yaitu pada saat akan melakukan pembayaran terkendala tunggakan pajak di tahun lalu yang harus dilunasi terlebih dahulu, sedangkan wajib pajak tersebut tidak mengerti akan adanya aturan tersebut. Terdapat lima narasumber yang mengalami kendala lokasi pembayaran yang jauh sehingga menimbulkan rasa malas untuk membayarnya dan terjadi keterlambatan. Dua wajib pajak yang lain mengalami kendala SPPT yang tertukar dengan lainnya sehingga kesulitan pada saat membayar.

6. Apakah selama ini anda mendapat sosialisasi dari aparaturn setempat terkait Pajak Bumi dan Bangunan?

Berdasarkan pertanyaan tersebut didapatkan berbagai jawaban yang berbeda. Dari sepuluh narasumber terdapat tiga orang yang belum mendapat sosialisasi terkait PBB oleh pihak aparaturn Kelurahan Mojolangu sehingga menyebabkan kendala dalam membayar PBB.

7. Apakah sosialisasi yang diberikan sudah cukup untuk mengetahui informasi terkait PBB?

Berdasarkan pertanyaan tersebut delapan dari sepuluh narasumber merasa bahwa sosialisasi yang didapatkan sudah dapat memberikan informasi yang

cukup terkait PBB. Yang mana informasi – informasi tentang kemudahan dalam pembayaran PBB yang dapat dilakukan dimana saja, terkait tenggat waktu dalam pembayaran dan juga informasi terkait adanya pemutihan PBB. Narasumber mengatakan bahwa sosialisasi tersebut sangat membantu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB.

8. Menurut anda, apakah sosialisasi yang diberikan oleh aparaturn setempat sudah cukup efektif dalam memberikan kesadaran terhadap kewajiban membayar PBB?

Ke delapan narasumber terkait mengatakan bahwa sosialisasi tersebut dinilai cukup efektif karena dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak, ditunjang dengan inovasi yang dibuat sehingga ada kemudahan dalam melakukan pembayarannya.

9. Biasanya, siapa saja yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi tersebut?

Ke delapan narasumber mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan oleh para ibu – ibu PKK di Kelurahan Mojolangu.

10. Apakah anda pernah mendapat wawasan tentang PBB selain melalui sosialisasi dari rumah – kerumah?

Dari ke sepuluh narasumber terdapat dua narasumber yang mengatakan bahwa pernah mendapat wawasan terkait PBB pada saat akan mengurus izin pendirian usaha dikarenakan Kelurahan Mojolangu membuat regulasi untuk menyertakan bukti lunas PBB sebagai syarat dalam mengurus izin pendirian usaha. Hal tersebut dinilai merupakan kesempatan narasumber untuk menanyakan hal – hal yang berkaitan dengan PBB, dan pihak aparaturn Kelurahan Mojolangu menjelaskan dengan baik dan rinci.

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Lurah Mojolangu



Wawancara Dengan Staff Kelurahan Ibu Sarofah



Wawancara Dengan Pokmas Sadar Pajak



Wawancara Dengan Wajib Pajak











